

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH
2 TAHUN (2026 - 2027)**

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

LANGKAH 1

1. DATA GENDER

**Jumlah Penduduk (Dalam Ribuan) Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang, Tahun 2024**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	3,01	2,88	5,89
5–9	2,52	2,48	5,00
10–14	2,44	2,25	4,69
15–19	2,59	2,37	4,95
20–24	2,51	2,35	4,86
25–29	2,47	2,52	5,00
30–34	2,38	2,45	4,83
35–39	2,25	2,13	4,38
40–44	2,01	1,94	3,94
45–49	1,91	1,76	3,66
50–54	1,63	1,63	3,25
55–59	1,41	1,44	2,85
60–64	1,12	1,17	2,29
65–69	0,78	0,88	1,65
70–74	0,48	0,67	1,15
75+	0,37	0,68	1,05
Jumlah/ <i>Total</i>	2024²	29,88	29,60
	2023²	29,46	29,17
	2022²	32,85	25,00
	2021¹	28,63	28,34
	2020	28,29	28,03
	2019	26,82	26,87
	2018	26,40	26,59

Sumber : BPS Kota Padang Panjang 2024

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebanyak 59.450 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang terbilang kecil, hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk tahun 2024 terhadap tahun 2023, hanya terjadi pertumbuhan sebesar 1,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terhadap tahun 2018 (7 tahun) terjadi pertumbuhan 12,19 persen. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Padang Panjang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 0,94%.

- Dokumen perencanaan Kota yang akan disusun pada Tahun 2026 adalah
 1. RKPD Tahun 2027
 2. Perubahan RKPD Tahun 2026
- Penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa proses/tahapan, yaitu Rembug Warga (Marenbang RT), Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD
- Keseluruh Proses/tahapan ini melibatkan seluruh partisipasi stakeholder, baik OPD maupun masyarakat, antara lain:
 1. Perangkat daerah
 2. Forum Anak
 3. Forum Disabilitas
 4. Bundo Kanduang
 5. PKK
 6. LKAAM
 7. Akademisi
 8. Profesional
 9. Organisasi Pemuda/masyarakat lainnya
- Isu yang diangkat Bappeda adalah
 1. Kurangnya partisipasi disabilitas dan lansia dalam Musrenbang Kota Padang Panjang
 2. Prevalensi disabilitas Sumbar lebih tinggi dari nasional, dimana di Sumbar pada angka 33%, sedangkan nasional 22% (tahun 2021)
 3. Jumlah disabilitas di Kota Padang Panjang Panjang 396 jiwa (menurut data Pilkada 2024) dengan Persentase kehadiran (partisipasi) disabilitas dalam proses perencanaan saat ini baru pada angka 1%
 4. Dalam pelaksanaan musrenbang masih didominasi oleh aparaturnya sehingga dalam proses perencanaan pembangunan masih bias GEDSI (Gender Equality, Disability dan Social Inclusion)

LANGKAH 2

2. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB

- **Akses**
Kurang updatenya data tentang disabilitas kota padang sehingga tidak semua orang disabilitas bisa dijangkau
- **Partisipasi**
Masih minimnya peserta musrenbang dari disabilitas
- **Kontrol**
Keterbatasan program pembangunan yang ramah disabilitas
- **Manfaat**
Kurangnya perhatian tentang disabilitas dalam penyusunan program pembangunan

Faktor Penyebab dari OPD :

1. SDM : Belum semua ASN paham tentang ARG dan isu gender pada urusan yang diemban
2. Regulasi : Regulasi yang dimiliki sudah mencukupi namun implementasi atas regulasi yang ada belum ditindaklanjuti.
3. Data : Belum adanya data update terkait disabilitas. Sebagian data OPD belum responsive gender

LANGKAH 3

3. KERANGKA KERJA

- **Impact :**
Meningkatnya kinerja pembangunan daerah (indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)
- **Outcomes Intermediately (Program) :**
Persentase Program RPJMD yang terakomodir dalam RPJMD
- **Outcomes Immediately (Kegiatan) :**
 - a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan.
 - b. Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah
 - c. Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi
 - a. Jumlah sistem informasi yang dikelola
- **Output (Sub Kegiatan)**
 - a. Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD
 - b. Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah
 - c. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
 - d. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - e. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
 - f. Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan
 - g. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
 - h. Jumlah Dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
 - i. Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
 - j. Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
 - k. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
 - l. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 - m. Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
 - n. Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota

RENCANA AKSI

Kode					Nomenklatur Urusan Kabupaten Kota	Kinerja	Indikator	Satuan	Target		Pagu Indikatif	
									2026	2027	2026	2027
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	86	87	188.733.800	337.374.723
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Dokumen	3	2	167.847.800	312.374.723
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	19.413.200	30.000.000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	148.434.600	264.374.723
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	%	88	89	5.161.000	10.000.000
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	5.161.000	10.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4	4	15.725.000	15.000.000
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	10	15.725.000	15.000.000
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya Padang Panjang Satu Data	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	Modul	5	5	0	0
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tersedianya elemen data yang ditetapkan untuk pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	41	41	0	0

Kode					Nomenklatur Urusan Kabupaten Kota	Kinerja	Indikator	Satuan	Target		Pagu Indikatif	
									2026	2027	2026	2027
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terkoordinasinya dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	163.021.350	105.000.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan terhadap Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang PMSBP	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	46.530.350	60.000.000
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi dalam kebijakan serta mengawal konsistensi program dan kegiatan OPD dalam percepatan penurunan stunting	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	16.607.350	30.000.000
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akurat dan pengelolaan data kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	29.923.000	30.000.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	9.620.000	15.000.000
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terkoordinasinya lintas sektor urusan perumahan, permukiman bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	8	8	9.620.000	15.000.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan terhadap Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	106.871.000	30.000.000
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya lintas sektor terkait pengelolaan data geospasial, pemberdayaan masyarakat dan irigasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	106.871.000	30.000.000

LANGKAH 4

4. OPD YANG DILIBATKAN
Seluruh OPD

Padang Panjang, 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

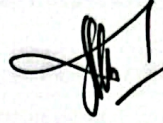
PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19760530 200003 1 005

GENDER ACTION BUDGET / KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA

Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang
Program	5.01.02. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kinerja	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Satuan	Berita Acara
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Permendagri Nomor 15 Tahun 008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 4. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender untuk Pemerintah Daerah 5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 6. Perwako Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Gambaran Umum (Merupakan nalisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029; 2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan; 3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;

	4. Untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga RPJMD dapat menerjemahkan dan mengadaptasi prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; 5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029; dan 6. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2025-2029. Bappeda sebagai pengarah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali, karena tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini akan membahas dan menyempurnakan rancangan RKPD Kota Padang Panjang melalui pembahasan Renja OPD dan prioritas pembangunan daerah serta prioritas dan aspirasi masyarakat Kota Padang Panjang sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan. Keseluruhan proses/tahapan ini melibatkan seluruh partisipasi stakeholder, baik OPD maupun masyarakat, antara lain : Perangkat Daerah, Forum Anak, Forum Disabilitas, Bundo Kandung, PKK, LKAAM, Akademisi, Sekolah, Profesional, Organisasi Pemuda dan lain sebagainya Dalam prakteknya saat pelaksanaan pertemuan ini keterwakilan dari disabilitas sangat sedikit (2%) sehingga belum begitu terasa gaungnya dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ditambah lagi belum banyaknya aparatur yang memahami pentingnya kesetaraan gender ini sehingga terkesan abai dengan hak-hak disabilitas. Diharapkan lebih terasa warna pengarusutamaan gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran selanjutnya
B. Penerima Manfaat	Seluruh masyarakat
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Metode yang digunakan untuk kegiatan adalah metode swakelola, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang sebagai penanggungjawab anggaran.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Sesuai dengan aturan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dari K/L
D. Kurun Waktu mencapai Keluaran	Januari – Desember 2026
E. Biaya yang diperlukan	Rp. 19.413.200,-

Padang Panjang, 2026
Penanggung Jawab
Kabid. Perencanaan Makro, Evaluasi
dan Informasi Pembangunan Daerah
BAPPEDA Kota Padang Panjang



Sri Endang Mulyati, S.Sos ME,
NIP. 19790228 200501 2 008

GENDER ACTION BUDGET / KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang
Program	5.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kinerja	Terlaksananya Koordinasi Pengarusutamaan Gender dan Stunting
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Satuan	Laporan
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 6. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender untuk Pemerintah Daerah 7. Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
2. Gambaran Umum (Merupakan nalisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	Pelaksanaan pemantauan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kota Padang Panjang agar lebih terarah, sistematis dan sinergis serta terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan PUG pada perangkat daerah sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kemudian melakukan koordinasi pelaksanaan program prevalensi percepatan penurunan stunting bersama Dinas Sosial PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan serta OPD pendukung lainnya, sebagaimana amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana dibutuhkan upaya bersama dalam waktu singkat untuk melaksanakan konvergensi/intervensi penurunan stunting.

	Sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya Menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender. Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan - Pokja PUG baru sebatas SK - Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal - PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan - Focal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan - Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan isue gender di dalam Renstra OPD. Diharapkan lebih terasa warna pengarusutamaan gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran selanjutnya
B. Penerima Manfaat	Seluruh masyarakat
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Metode yang digunakan untuk kegiatan adalah metode swakelola, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang sebagai penanggungjawab anggaran.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Sesuai dengan aturan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dari K/L
D. Kurun Waktu mencapai Keluaran	Januari – Desember 2026
E. Biaya yang diperlukan	Rp. 16.607.350,-

Padang Panjang, 2026
Penanggung Jawab
Kabid. Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan
Pemerintahan BAPPEDA Kota Padang Panjang


Ario Dian Pratama, ST
NIP. 19820808 200902 1 001